

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG TUNASUSILA DI KOTA BANJARMASIN

Rifky Firdaus¹, Muhammad Aini², Salafuddin Noor³

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM 17810261

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN : 1126108202

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN : 1104017210

Email:ikyfernando1997@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Tunasusila Di Kota Banjarmasin dan Apa saja kendala satuan polisi pamong praja dalam penertiban Tunasusila di Kota Banjarmasin.

Hasil Penelitian : **Pertama**, Penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2014 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Tunasusila Di Kota Banjarmasin melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) dari jam 22.00 Wita anggota sudah berkumpul di Halaman Satuan Polisi Pamong Praja, setelah itu pimpinan menyiapkan strategi dengan sekitar 15 orang anggota untuk memakai pakaian Preman (tidak menggunakan pakaian dinas pada hari itu) dan mereka memencar kebagian pasar sudimampir dan seolah – olah mereka ingin menggunakan jasa PSK tersebut. Setelah itu menunggu anggota lain menghubungi pimpinan bahwa target sudah dapat dan mobil patroli beserta anggota berpakaian dinas pun langsung menuju pasar sudimampir dan langsung menangkap target. **Kedua**, Dalam hal ini kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam melakukan Penertiban Tuna Susila Pasar Sudimampir yaitu PSK (Tuna susila) tersebut saat petugas datang banyak yang lari , Banyaknya tempat persembuyian dipasar sudimampir yaitu toko – toko kecil dan gelap nya pasar sudimampir tersebut anggota kesusahan dalam pencarian, Susah didapatkan semua PSK (Tuna susila) tersebut karena adanya premanisme yang menjaga mereka atau informan yang selalu stanbay di Tempat tersebut, sehingga ada saatnya kami melakukan rajia pasar sudimampir tersebut sepi, Kurangnya jumlah anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengejaran PSK (Tuna Susila) tersebut karena tempat pasar sudimampir itu cukup luas. Dan Kurangnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Penegakan, Penertiban, Tunasusila.

ABSTRACT

Rifky Firdaus, 17810261, 2021

Enforcement of Regional Regulation No. 12 of 2014 by the Civil Service Police Unit on Immorality in Banjarmasin City

Preceptor I Dr.Muhammad Aini ,S.HI.,M.H, Preceptor II Salafuddin Noor,S.HI.,M.H

The purpose of this study was to find out how the enforcement of regional regulations number 12 of 2014 by the civil service police unit regarding immorality in the city of Banjarmasin and what are the obstacles of the civil service police unit in controlling immorality in the city of banjarmasin.

Research Results: First, the enforcement of Regional Regulation No. 12 of 2014 by the Civil Service Police Unit on Immorality In Banjarmasin City carried out the PEKAT (Community Disease) operation from 22.00 WITA the members had gathered at the Civil Service Police Unit Page, after that the leadership prepared a strategy with about 15 members to wear thug clothes (not wearing official clothes on that day) and they scattered to get to the sudimampir market and it was as if they wanted to use the services of the prostitutes. After that, they waited for other members to contact the leadership that the target had been found and the patrol car along with members in official clothes went straight to the Sudimampir market and immediately caught the target. Second, in this case the obstacle faced by the Banjarmasin City Civil Service Police Unit in controlling the immorality of the Sudimampir Market, namely the prostitutes (Prostitutes) when the officers came, many ran away. the members have difficulty in searching, it is difficult to find all the prostitutes (promiscuous) because of the thuggery who keep them or the informants who are always on standby at the place, so there are times when we raid the Sudimampir market, it is quiet, the lack of members of the Civil Service Police Unit to The pursuit of prostitutes (Tuna Susila) is because the Sudimampir market is quite wide. And lack of facilities and infrastructure.

Keywords: Enforcement, Control, Immorality.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ali Akbar, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin, Kumpulan Perasaan MUKER Kesejahteraan Moral Jawatan Sosial Bagian Penyulihan*, 1960.

Abdulsyani. 2002. *Sosiologi: skematika, teori, dan terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro , *Parodos Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers , Jakarta.1989.

Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kartasapoetra Misdayani.1993. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sari Nugraha.2004. *Problematika Dalam Pengujian dan Pembuatan Perda Oleh Pemerintah Pusat*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 3.

OK. Chairuddin. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Perundang – Undangan

Undang – undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Di Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Tunasusila Di Kota Banjarmasin.

Internet

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-empiris/> di akses pada Sabtu tanggal 30 Juli 2021